

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Keterlibatan kaum awam dalam politik merupakan bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di tengah masyarakat. Keterlibatan tersebut merupakan sebuah panggilan dan perutusan dari Allah untuk ikut serta dalam menjalankan karya pewartaan Kristus dengan menghadirkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesungguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, sebagaimana Yesus menjalankan perutusan dari Bapa-Nya (bdk. Yoh 17: 1-26). Tugas perutusan yang diberikan Bapa ialah agar Yesus memuliakan Allah dengan memberikan kesejahteraan jiwa dan raga kepada semua manusia.

Teladan yang diberikan oleh Yesus dalam menerima perutusan dari Bapa-Nya mendasari pula panggilan dan perutusan kaum awam untuk mewujudkan imannya melalui perbuatan (bdk. Yak 2: 14,17). Dengan sifat keduniawiannya, kaum awam diutus untuk terlibat di tengah-tengah dunia, secara khusus di bidang politik. Dari sifat khasnya itulah, kaum awam perlu menyadari diri sebagai bagian dari masyarakat dan diutus untuk menyucikan dunia dengan menjadi terang dan rasi bagi sesama. Begitu juga berdasarkan panggilan dan martabatnya, kaum awam oleh karena pembaptisan menjadi anggota tubuh Kristus dan ambil bagian dalam perutusan dan tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus di dalam Gereja dan dunia (LG. 31).

Keterlibatan dalam tugas imam, kenabian, dan rajawi menjadi fondasi bagi keterlibatan awam dalam politik. Kaum awam perlu menyadari diri sebagai pribadi yang mau menyerahkan diri kepada Kristus,ewartakan Kristus dan menjadi saksi yang diutus untuk menguduskan dunia dengan diresapi semangat Injil. Oleh karena itu, melalui keterlibatannya dalam kehidupan politik kaum awam wajib untuk menjunjung tinggi martabat manusia, menghormati hak-hak asasi manusia, memperjuangkan kesejahteraan bersama, keadilan dan perdamaian. Melalui sikap moral, kompetensi, dan keterampilan atau kinerjanya, kaum awam wajib memberikan sumbangan positif etis dengan menolak cara-cara pencapaian tujuan politis yang bertentangan dengan martabat manusia maupun kesejahteraan umum.

Akan tetapi, situasi yang dihadapi oleh kaum awam dalam keterlibatannya di wilayah politik memang tidak mudah. Kaum awam dihadapkan kepada berbagai kenyataan kehidupan politik di Indonesia yang seringkali mengabaikan prinsip-prinsip moral, seperti praktik penyelewengan kekuasaan dalam bentuk korupsi yang semakin marak hingga merusak sendi kehidupan bangsa. Kekuasaan terkait jabatan politik dipandang secara transaksional sehingga praktik jual-beli jabatan terjadi dalam pemerintahan. Manipulasi kekuasaan yang berkaitan dengan praktik korupsi tentu berbuah ketidakadilan bagi masyarakat. Begitu juga, kekuasaan dan politik terkait erat dengan kepentingan golongan. Hal ini ditandai dengan sikap para wakil rakyat, pejabat pemerintah, aparat hukum dan partai politik yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan untuk memenuhi kepentingan sendiri atau kelompok.

Berhadapan dengan situasi demikian, panggilan berpolitik kaum awam Keuskupan Bandung yang telah dibahas pada bab empat juga menunjukkan bahwa umat Katolik merasa tidak mau terlibat dalam politik karena praktik politik yang kotor. Terdapat pandangan bahwa politik digunakan sebagai sarana mencapai kekuasaan dengan cara-cara kotor, yakni politik uang, politisasi SARA, hoaks. Selain itu, terdapat pula alasan yang menyebabkan umat Katolik tidak mau terlibat dalam politik, yakni umat merasa tidak memiliki kompetensi berpolitik dan merasa tidak harus berada di atas panggung politik.

Berbagai alasan ini pun menandakan adanya persoalan apatisisme kaum awam dalam politik. Politik pun secara personal dapat memberikan suatu pengalaman pahit atau menyakitkan. Akan tetapi, politik secara global mengajak setiap orang untuk tidak bisa diam atas situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Artinya, kehidupan seseorang tidak bisa terlepas dari politik. Politik akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, apatisisme dalam berpolitik justru akan semakin merugikan kehidupan seseorang bahkan masyarakat secara luas. Sebaliknya, apatisisme berpolitik perlu untuk diolah menjadi sebuah kesadaran dan kepedulian terhadap kehidupan politik. Sepertihalnya, tindakan yang dapat kaum awam lakukan ialah mencegah yang oknum-oknum jahat berkuasa melalui berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih.

Kenyataan mengenai kaum awam yang tidak mau terlibat dalam politik ternyata tidak menyurutkan panggilan beberapa kaum awam untuk terlibat dalam politik. Beberapa pengalaman berpolitik kaum awam Keuskupan Bandung dalam bab empat menunjukkan adanya kesadaran kaum awam untuk berpolitik (sebagai

anggota partai politik, pengamat politik, organisasi kemasyarakatan). Kesadaran berpolitik itu muncul karena kaum awam merasa tidak bisa lari dari politik itu sendiri. Kaum awam menyadari bahwa berbagai aspek kehidupan sangat lekat dengan politik, seperti halnya Undang- Undang 1945 yang menjadi salah satu pilar masyarakat Indonesia dalam berperilaku dan bermasyarakat sehari- hari.

Bahkan, kaum awam meyakini pula bahwa politik itu penting untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan bersama (*bonum commune*). Kaum awam memandang bahwa keterlibatan dalam bidang politik merupakan suatu panggilan untuk menata dan menggarami dunia dengan teladan yang diwartakan Yesus Kristus. Kaum awam tidak dapat memilih diam dan tidak berbuat apapun untuk membiarkan kehidupan berbangsa dan bernegara dikuasai oleh oknum atau pihak yang memiliki kepentingan untuk menjadi penguasa. Dengan demikian, kaum awam yang terlibat dalam politik menyadari bahwa semakin banyak orang baik berdiam dan apatis terhadap politik justru akan membiarkan banyak orang jahat untuk berkuasa dan melancarkan segala hal kepentingan yang lebih bersifat menguntungkan dirinya sendiri.

Dengan menghadapi kenyataan politik yang tidak sesuai dengan hakekatnya, termasuk pandangan bahwa politik itu kotor, maka kaum awam perlu kembali kepada visi dan misi politik yang sebenarnya. Kaum awam dipanggil untuk terlibat dalam kehidupan politik demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kaum awam perlu melaksanakan perutusannya dengan selalu melihat tugas yang diterimanya sebagai ungkapan iman. Dalam hal ini, nilai-nilai yang diajarkan Yesus Kristus menjadi pedoman dalam setiap keterlibatannya.

Keterlibatan kaum awam dalam politik pun sangat dibutuhkan untuk membangun suatu tata dunia yang lebih baik. Dalam berbagai persoalan kehidupan politik, dibutuhkan kaum awam yang mau terlibat secara aktif mewujudkan kesejahteraan bersama. Keterlibatan tersebut menuntut kaum awam memiliki integritas pribadi yang tercermin dari keterampilan atau kompetensi dan moralitas dalam keterlibatan berpolitik. Untuk itu, kaum awam diharapkan memiliki pemahaman dan wawasan yang tepat mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Harapannya, pemahaman dan wawasan tersebut dapat mengarahkan keterlibatan yang sungguh kepada kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan moralitas dalam politik, kaum awam diharapkan tidak terjebak ke dalam politik dalam arti sempit, yakni politik kekuasaan. Kaum awam perlu tegas untuk tidak menjadikan politik sebagai tujuan demi mencari keuntungan serta kepentingan diri sendiri. Sebab, keterlibatan kaum awam terarah kepada sikap melayani kepentingan semua orang. Melayani kepentingan semua orang menegaskan bahwa keterlibatan kaum awam ditujukan agar keadilan tercipta bagi semua warga negara. Dengan begitu, penegakan keadilan diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, Gereja dengan seluruh anggotanya perlu memperjuangkan pembaharuan politik. Gereja perlu menegaskan dan mendukung bahwa keterlibatan kaum awam dalam politik itu penting untuk terwujudnya kesejahteraan bersama. Hal yang dapat dilakukan Gereja dan seluruh umatnya ialah perubahan praktik politik yang menjadi politik kompetensi dan pengabdian. Dalam hal ini, kaum awam dituntut untuk memiliki integritas diri, komitmen yang kuat, dan moralitas yang baik dengan menyuarakan kebenaran, kejujuran dan

keadilan demi terciptanya kesejahteraan bersama. Selain itu, keterlibatan kaum awam perlu didasari juga oleh kesadaran untuk membangun relasi, jejaring, dan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Semangat kerja sama ini merupakan usaha untuk merubah politik yang sektarian dan primordialis menjadi politik yang terbuka dan pluralistik. Dengan begitu, keterlibatan kaum awam bersama pihak-pihak lain untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama dapat semakin utuh terwujud.

5.2 Rekomendasi Pastoral

Keterlibatan kaum awam dalam politik untuk mewujudkan kesejahteraan bersama perlu didasari oleh kesadaran untuk mewujudkan imanya dalam perutusannya di dunia. Artinya, kaum awam perlu menyadari diri dan menghayati panggilan hidupnya sebagai bagian dari masyarakat. Konsekuensinya, dengan berbagai persoalan dalam politik, kaum awam perlu terlibat untuk menata, membersihkan, dan menguduskan dunia politik tersebut.

Untuk mewujudkan kehidupan politik yang bersih dan sesuai dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama terdapat beberapa rekomendasi bagi keterlibatan kaum awam dalam politik. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memperbaharui diri dalam memandang politik, sekaligus rekomendasi ini dapat membekali dan mempersiapkan kaum awam untuk hadir dan terlibat dalam mewujudkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Berikut rekomendasi pastoral bagi keterlibatan kaum awam dalam bidang politik:

a. Pendampingan spiritual

Keterlibatan kaum awam dalam politik perlu dibekali dengan pendampingan spiritual yang diberikan oleh Gereja. Gereja melalui program pendampingan spiritual perlu menegaskan bahwa iman Kristiani perlu dihayati dalam konteks nyata dalam kehidupan, khususnya dalam bidang politik. Iman pun perlu dihayati dan diwujudkan dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendampingan spiritualitas dalam berbagai bentuk, misalnya retret, rekoleksi, juga diperlukan untuk membekali spiritualitas kepada awam untuk menyadari panggilan hidupnya. Secara khusus, panggilan untuk mewujudkan iman melalui berbagai perutusan di dalam dunia. Perwujudan iman tersebut perlu disadari sebagai tanggapan akan kasih Allah, di mana manusia dicintai Allah dan dipanggil untuk menguduskan tata dunia.

Selain itu, pendampingan spiritual juga perlu menegaskan akan pentingnya sikap yang perlu dihidupi dan dihayati, yakni hormat terhadap martabat manusia, memperjuangkan keadilan untuk dapat menjadi manusia utuh, solidaritas untuk memihak korban ketidakadilan, menghargai kemampuan setiap orang, menaati dan menjamin terciptanya aturan yang adil, demokrasi yang tidak memdiskriminasi kelompok minoritas, dan tanggung jawab kepada rakyat.

b. Pendidikan Politik

Keterlibatan awam di bidang politik perlu dibarengi juga dengan adanya pendidikan politik. Pendidikan politik yang dilakukan melalui sekolah kebangsaan menjadi langkah konkret untuk memberikan bekal wawasan bagi awam dalam

menghadapi persoalan politik. Dalam pendidikan politik, kaum awam juga perlu diperkenalkan untuk memahami makna panggilan berpolitiknya dalam berbagai dokumen dan seruan Gereja, seperti halnya *Lumen Gentium*, *Apostolicam Actuositatem*, Nota Pastoral bahkan surat gembala. Selain itu, pendidikan politik perlu dibarengi dengan wawasan kebudayaan tempat berkarya.

Dalam hal lain, untuk memberikan pandangan bahwa politik itu tidak kotor sehingga umat tidak perlu menghindari politik, maka dibutuhkan katekese umat mengenai keterlibatan Gereja dalam sosial kemasyarakatan. Katekese ini dimaksudkan agar umat secara luas dapat mengetahui dan memahami ajaran Gereja tentang panggilan berpolitik. Pendidikan politik dimaksudkan juga untuk kaderisasi kaum awam. Gereja dalam diri Hirarki perlu membantu sarana dan prasarana untuk terciptanya kader politik yang bermoral. Untuk itu, Gereja perlu mempersiapkan berbagai fasilitas untuk kaderisasi ini, misalnya, literasi teknologi maupun berbagai forum dan diskusi mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Membangun politik yang Bermoral

Keterlibatan seseorang awam dalam politik sangatlah diperlukan. Sebagai seorang beriman kristiani, awam berhak atau bisa masuk ke dalam segala macam golongan dan atau Partai Politik. Melalui keterlibatannya itulah, awam menyuarakan segala macam kebenaran yang bersumber dari iman dan moralitas Katoliknyanya. Dalam keterlibatannya itulah, diharapkan kaum awam membangun politik yang bermoral, yakni dengan menempatkan kesejahteraan seluruh rakyat sebagai tujuan yang tertinggi. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa segala usaha yang

dilakukan kaum awam ditujukan untuk menyejahterakan jasmani-rohani seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Membangun politik yang bermoral berarti, awam perlu berkomitmen untuk menjalankan tugas perutusan di bidang politik, seperti halnya berhadapan dengan biaya politik dan praktik korupsi. Awam perlu berusaha memperkuat diri untuk dapat memiliki integritas, kejujuran dan nurani. Berhadapan dengan mahalanya biaya politik dan maraknya korupsi, awam diharapkan dapat menolak praktek kotor tersebut.

d. Mengembangkan Relasi dengan Masyarakat

Kaum awam dalam keterlibatnya dalam politik perlu untuk menunjukkan semangat pengorbannya untuk kepentingan seluruh rakyat, yakni kesejahteraan bersama. Politik pun perlu dijalankan dengan semangat untuk menjalankan prinsip yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kedamaian bukan justru tenggelam dalam orientasi politik yang mengarah kepada kekuasaan dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, umat awam tidak bisa berusaha sendiri. Artinya, kaum awam perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan umum. Kaum awam pun dituntut untuk berani keluar dari zona nyaman dari dalam dirinya dan berani untuk membangun kepercayaan, kerja sama dan mempererat relasi dengan komunitas-komunitas non-Katolik.

e. Menjadi Pemilih yang Cerdas

Kaum awam sebagai bagian dari masyarakat bertanggung jawab untuk ambil bagian dalam demokrasi, yakni ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam partisipasi itu, kaum awam dituntut untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan kaum awam ambil bagian dalam perubahan suatu masyarakat yang lebih baik lagi. Untuk menjadi pemilih yang cerdas, kaum awam perlu untuk memilih dengan akal sehat dan hati nurani. Dengan akal sehat kaum awam diharapkan dapat memilih secara objektif, tidak dipengaruhi oleh faktor pragmatis seperti politik uang faktor primodilisme yang didasarkan pada hubungan kekerabatan, suku, agama, dsb. Dengan hati nurani, kaum awam diharapkan dapat memilih dengan pertimbangan moral terhadap kualitas karakter dan integritas calon, serta kualitas intelektual dan profesionalnya. Selanjutnya, untuk menjadi pemilih yang cerdas, kaum awam perlu menggunakan hak pilih, mencermati *track record* partai dan calonnya.

f. Menumbuhkan Kepedulian terhadap Politik

Dalam usaha menumbuhkan kepedulian kaum awam dalam politik, kaum awam perlu menyadari diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terlibat dan merawat masa depan bangsa. Dengan berbagai kesadaran akan problematika berpolitik di Indonesia yang telah dipaparkan di bab tiga, kaum awam perlu peduli terhadap politik dengan:

- Merawat demokrasi di Indonesia dengan berusaha untuk mencegah dan menolak praktik politik yang tidak sehat atau menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu kekuasaan. Kaum awam juga bertanggung

jawab untuk mencegah usaha memecah belah persatuan dalam bentuk intimidasi dan kekerasan.

- Menolak politik uang. Setiap orang yang terlibat dalam politik merupakan seseorang yang terpanggil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama karena integritas dan kualitasnya. Begitu juga dengan para wakil rakyat maupun pejabat pemerintah dipilih bukan karena semata-mata kekayaan atau materi yang diberikan kepada pemilih. Umat Katolik pun perlu menyadari diri untuk menjadi pribadi yang berintegritas dengan menolak politik uang guna mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi masyarakat.
- Menolak politik SARA. Semangat menolak politik SARA merupakan perwujudan adanya tanggung jawab sebagai warga negara yang meyakini pentingnya persatuan dan perdamaian bangsa. Bahkan, dengan berbagai tantangan akan adanya perpecahan dan konflik yang disebabkan oleh politik SARA mengajak kaum awam untuk semakin menghayati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kaum awam perlu mengupayakan diri untuk menjadi agen perdamaian dengan menjalin persahabatan dengan semua orang dari berbagai latar belakang.
- Bijak dalam media sosial. Sikap ini sangat diperlukan kaum awam dalam menjalankan politik yang diwarnai derasnya berita palsu atau ujaran kebencian. Kaum awam perlu untuk bertanggung jawab menjadi umat yang bijak dan cerdas dalam bersosial media dengan tidak ikut serta menyebarkan informasi yang bertanggung jawab.

Media sosial dalam politik perlu diarahkan kepada komunikasi dan promosi perdamaian, keadilan dan kejujuran.

- Pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai dan tanggung jawab publik bagi anak didik, mulai dari keluarga hingga pendidikan formal (sekolah). Adanya pendidikan yang diarahkan untuk dapat menanamkan nilai-nilai diharapkan dapat menciptakan kualitas pribadi yang penuh integritas.
- Adanya dialog kehidupan sebagai cara bertindak maupun semangat yang membimbing seseorang berperilaku. Dalam semangat dialog tersebut tercakup segala usaha untuk saling menghormati, saling menghargai, terbuka terhadap perbedaan dan menerima orang lain dengan berbagai latar belakang. Dalam semangat dialog inilah, seseorang dapat saling bekerja sama dalam menghayati hidup maupun berbagai bidang kerja, seperti halnya politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalas, Mutiara. P. (2008), *Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan*. Gunung Mulia, Jakarta.
- Bonino, Jose Miguez. (1986), *Toward a Christian Political Ethics*. Claretian Publications, Philippines.
- Budiardjo, Miriam. (1986), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta.
- Buehler, Michael. (2016), *The Politics of Shari'a Law Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press, United Kingdom.
- Calixto V. Chikiamco. (1998), *Why We Are Who We Are, Essays on Political Economy*. Foundation For Economic Freedom, Philipines.
- Cassidy Richard J. (1980), *Jesus, Politic, And Society: A Study of Luke's Gospel*. Maryknoll Orbis Books, New York.
- Chang, William. (2001), *Kerikil-Kerikil di Jalan Reformasi*. Kompas, Jakarta.
- Flynn, Gabriel. (2004), *Yves Congar's Vision of the Church in a World of Unbelief*. Ashgate, England.
- Hardiman, F. Budi. (2013), *Dalam Moncong Oligarki*. Kanisius, Yogyakarta.
- Ishak, Otto Syamsuddin. (2016), *Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Ketahanan Nasional*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kleden, Paulus Budi. (2003), *Teologi Terlibat*. Ledalero, Maumere.
- _____, Philipus Tule (ed.). (2006), *Rancang Bersama: Awam Dan Klerus*. Ledalero, Maumere.
- Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia. (2013), *Kerasulan Politik – Panggilan dan Perutusan Umat Katolik*.
- _____. (2013), *Modul Pendidikan Politik Umat Katolik*.
- _____. (2017), *Revitalisasi Pancasila*.
- Kristiyanto, Eddy. (ed). (2006), *Konsili Vatikan II Agenda yang Belum Selesai*. Obor, Jakarta.
- _____. (2008), *Sakramen Politik Mempertanggungjawabkan Memoria*. Lamarela, Yogyakarta.
- _____. (2015), *Seandainya Indonesia Tanpa Katolik*. Obor, Jakarta.

- _____. (ed.). (2011), *Semakin Mengindonesia Indonesia; 50 Tahun Herarki*. Kanisius, Yogyakarta.
- _____. (ed.). (2010), *Spiritualitas Sosial: Suatu Kajian Kontekstua*. Kanisius, Yogyakarta.
- Kleden, Ignas. (2001), *Menulis Politik: Indonesia sebagai Utopia*. Kompas, Jakarta.
- Krispurwana Cahyadi, T. (2006). *Katolik dan Politik*. Jakarta: Obor.
- KWI, Komisi Teologi (ed.). (2012), *Kompendium Konsili Vatikan II Konteks Indonesia*. (Kanisius, Yogyakarta).
- Mali, Mateus. (2014). *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- M. L. dan Levering, M., (ed.). 2008, *Vatican II Renewal within Tradition*, University Press, Oxford.
- Peschke, Karl-Heinz. (2003), *Etika Kristiani, Jilid IV Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial*. Ladalero, Maumere.
- Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. (2012), *Pancasila, Kekuatan Pembebas*. Kanisius, Yogyakarta.
- Saragih, Juliaman (ed). (2018), *Mengawal Demokrasi, Menolak Politik SARA, Merawat Kebhinekaan*, NCBI dan Cultura di Vita, Jakarta.
- Soedarmanta, J.B. (2011), *Politik Bermartabat: Biografi I.J Kasimo*. Gramedia, Jakarta.
- Storrar, F. William and Andrew R. Morton (ed.). (2004), *Public Theology for 21st Century: Essays in Honour of Duncan N Forrester*. T&T Clarck, London and New York.
- Suseno, Franz Magnis. (1993), *Beriman Dalam Masyarakat Butir-Butir Teologi Kontekstual*. Kansius, Yogyakarta.
- _____.(1987), *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia, Jakarta.

Dokumen Gereja:

- Fransiskus, Paus. (2013). *Evangelii Gaudium: Seruan Apostolik Sukacita Injil*. Departemen Dokumentasi Penerangan KWI, Jakarta.

Konsili Vatikan II. (1964), *Apostolicam Actuositatem: Dekrit tentang Kerasulan Awam*.

Konsili Vatikan II. (1964), *Lumen Gentium: Konstitusi Dogmatis tentang Gereja*.

Konsili Vatikan II. (1965), *Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini*.

Referensi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). (2018), *Peran Serta Umat Katolik dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas*. Jakarta.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 4, (1989). Cipta Adi Pustaka, Jakarta.

Heuken, A (ed). (1991), *Ensiklopedi Gereja I A-G*. Cipta Loka Caraka, Jakarta.

Keuskupan Bandung. (2015), *Hasil Sinode Keuskupan Bandung, Sehati Sejiwa Berbagi Sukacita*.

Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia. (2016), *DOCAT, Apa yang harus dilakukan? Ajaran Sosial Gereja*. Kanisius, Yogyakarta.

Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia. (2006), *Kaum Awam Katolik dan Keadaban Publik Bangsa*.

Lembaga Alkitab Indonesia. (2010), *Alkitab*. Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta.

Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia. (2018), *Panggilan Gereja dalam Hidup Berbangsa: Menjadi Gereja yang relevan dan signifikan*.

O'Collins, Gerald dan Edward G. Farrugia. (1996), *Kamus Teologi*. Kanisius, Yogyakarta.

Putranto, Ig. Eddy (ed.). (2012), *Seri Kedua: 80 Tahun Keuskupan Bandung Sejarah Keuskupan Bandung, Semakin Mandiri untuk Menjadi Ragi*.

INTERNET

Abba Gabrillin, “Lemahnya Inspektorat dan Biaya Politik Mahal Dinilai Penyebab Korupsi 34 Daerah”, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/07/10381291/lemahnya-inspektorat-dan-biaya-politik-mahal-dinilai-penyebab-korupsi-34?page=all>. Diakses pada 12 Juli 2018, pk. 20.15

Veri Junaidi, “Pilkada Serentak: Bagaimana Dampak politik Dinasti dan apa yang perlu dihambat?” tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44597871>. Diakses pada 13 Juli 2019, pk 09.10.

Dewiyatini, “Ada Politik Uang di Masa Tenang Pemilu 2019”, tersedia di <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/04/16/ada-politik-uang-di-masa-tenang-pemilu-2019>. Diakses pada 13 Juli 2019, pk. 09.30.

Fitria Chusna Farisa, “Situng 80 persen: Jokowi-Ma’ruf Raih 69 Juta Suara, Prabowo-Sandiaga 53 Juta,” tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/13/19101501/situng-80-persen-jokowi-maruf-raih-69-juta-suara-prabowo-sandiaga-53-juta>. Diakses pada 13 Juli 2019, pk 10. 03.

Kustin Ayuwuragil, “Survei LIPI: Isu SARA Berpotensi Hambat Pemilu 2019”, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808090003-32-320434/survei-lipi-isu-sara-berpotensi-hambat-pemilu-2019>. Diakses pada 13 Juli 2019, pk 10.13.

Diani Hutabarat, “771 Hoax Berhasil Diidentifikasi Kominfo”, tersedia di https://www.kominfo.go.id/content/detail/16922/771-hoax-berhasil-diidentifikasi-kominfo/0/sorotan_media. Diakses pada 13 Juli 2019, pk 10. 28.

Administrator, “Pasukan Maya di Dunia Nyata”, tersedia di <https://majalah.tempo.co/read/152036/pasukan-maya-di-dunia-nyata#>. Diakses pada 13 Juli 2019, pk.10.42.

MAJALAH

Devy Ernis, “Berkat Agama dan Hoaks” dalam Laporan Utama, *Majalah Tempo*, 22-28 April 2019, hlm. 44-45.

Linda Novi Trianita, “Zaman Jahiliah Jual-Beli Posisi”, dalam Laporan Utama *Majalah Tempo*, 18-24 Maret 2019, hlm. 62-65.

Musatafa Moses, “Duit Tanpa Kuitansi di Laci Menteri”, dalam Laporan Utama, *Majalah Tempo*, 25 -31 Maret 2019, hlm. 58-61.

KORAN

Asrinaldi A, “Kematangan Elite Politik Kita” dalam Opini *Kompas*, Rabu 22 Mei 2019, hlm. 6.

Ahmad Khoirul Umam, “Memecah Kebekuan Politik Identitas”, dalam Opini *Kompas*, Rabu, 22 Mei 2019, hlm. 7.

